

12-30-2018

## Pendekatan Konsep Harmoni dalam Manajemen Konflik oleh Jepang dalam Isu Sengketa Senkaku/Diaoyu dengan Tiongkok

Rudi Saeputra

*Department of International Relations, Universitas Indonesia, rudi.yang888@gmail.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), [International and Area Studies Commons](#), [International Relations Commons](#), [Law Commons](#), and the [Political Theory Commons](#)

---

### Recommended Citation

Saeputra, Rudi (2018) "Pendekatan Konsep Harmoni dalam Manajemen Konflik oleh Jepang dalam Isu Sengketa Senkaku/Diaoyu dengan Tiongkok," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 20 : No. 2 , Article 3. DOI: 10.7454/global.v20i2.330

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol20/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## PENDEKATAN KONSEP HARMONI DALAM MANAJEMEN KONFLIK OLEH JEPANG DALAM ISU SENGKETA SENKAKU/DIOAYU DENGAN TIONGKOK

**Rudi Saeputra**  
**Universitas Indonesia**  
**Email: rudi.yang888@gmail.com**

### **Abstrak**

*Konflik Senkaku merupakan perseteruan Tiongkok-Jepang dalam memperebutkan gugusan delapan pulau karang yang terletak di Laut Tiongkok Timur. Kepulauan Senkaku berada di bawah kedaulatan pemerintah Jepang sejak 1895. Namun, Tiongkok menyanggah hal tersebut berdasarkan catatan sejarah. Tulisan ini menganalisis upaya repetitif damai Jepang dalam isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan Tiongkok. Sebagian besar kajian terdahulu mengenai perseteruan Jepang-Tiongkok membahas tentang kerjasama dan rejim, kebijakan dan strategi, proyeksi kekuatan dan persepsi ancaman, serta interaksi kompleksitas hubungan. Namun, rangkaian kajian tersebut belum menjelaskan alasan Jepang masih memilih mengusahakan upaya repetitif damai dalam meredam isu sengketa Kepulauan Senkaku/Dioayu. Dengan menggunakan pendekatan konsep harmoni dalam manajemen konflik, tulisan ini menjabarkan falsafah budaya dan kepentingan nasional sebagai latar pilihan strategi Jepang dalam menangani isu sengketa Kepulauan Senkaku/Dioayu. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa cara damai merupakan pilihan strategi Jepang yang sangat dipengaruhi oleh nilai budaya tradisional dan pencapaian kebutuhan ekonomi serta pertimbangan pengupayaan keamanan nasional Jepang.*

### **Kata kunci:**

*Konflik Senkaku, Tiongkok, Jepang, Kepulauan Senkaku/Diaoyu, Teori Manajemen Konflik.*

### **Abstract**

*The Senkaku dispute refers to a territorial claim between China and Japan over a group of eight pinnacle islands in East China Sea. Japan has taken a valid control over the Senkaku Islands since 1895. Yet, in the light of historical records, China claims the islands as a part of its ancient territory. This article aims to analyze Japan's motives in taking repetitive peaceful measure in handling the Senkaku/Diaoyu Islands dispute. Most of existing academic writing about China-Japan discord put emphasize on the findings related to mutual aid and regime, strategy and policy, power projection and threat perception, and interaction of complex relationship. Few, if any, scrutinize Japan's concern to take non-violent way to face China in the Senkaku/Dioayu dispute. By applying harmony-concept-invoked-approach of conflict management, this article goes for cultural philosophy and national interests as motives behind Japan's repetitive peaceful measure in the Senkaku/Diaoyu dispute. This article shows that the Japan's non-violent measure is induced by her value of traditional culture along with economy factor and national security.*

**Keywords:**

*Senkaku dispute, China, Japan, Senkaku/Diaoyu Islands, conflict management approach.*

**Pendahuluan**

Kajian ilmu Hubungan Internasional (HI) tidak pernah terlepas dari pembahasan tentang konflik internasional. Paradigma realisme merujuk konflik sebagai sebuah kondisi alamiah dan aliran liberalisme menganggap konflik sebagai sebuah hal yang wajar dalam hubungan internasional.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hubungan interaksi sesama aktor negara dan/atau antara aktor negara dengan aktor non-negara dalam dunia internasional sangat rentan terhadap konflik. Interaksi antar aktor internasional dilandasi pada kepentingan masing-masing aktor itu sendiri. Terlepas dari hubungan kerjasama internasional yang dijalin untuk mengupayakan pemenuhan kepentingan, pergesekan kepentingan antar aktor negara membuka peluang terjadinya konflik diantara kedua belah pihak. Selain konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan aktor negara, perebutan kekuasaan wilayah turut memicu timbulnya konflik. Sejarah bahkan mencatat bahwa konflik perebutan wilayah merupakan pemicu utama konflik yang berujung pada perang terbuka antar aktor negara (Holsti, 1991; Kocs, 1995; Forsberg, 1996). Meskipun jumlah konflik perebutan wilayah sudah semakin berkurang seiring dengan peningkatan interdependensi ekonomi, persengketaan wilayah masih menjadi salah satu konflik internasional (Mitchell, 2016).

Isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan salah satu konflik persengketaan wilayah yang terjadi di benua Asia. Isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merujuk pada persetujuan Jepang-Tiongkok dalam memperebutkan gugusan delapan pulau karang di Laut Tiongkok Timur. Secara geografi, kepulauan Senkaku/Diaoyu berada di sebelah timur daratan Tiongkok (PRC), sebelah timur laut Pulau Formosa (Taiwan/ROC), dan sebelah barat daya Kepulauan Ryukyu (wilayah Jepang). Kedaulatan wilayah Senkaku/Diaoyu berada di bawah pemerintahan Jepang dan termasuk kedalam wilayah administrasi Prefektur Okinawa. Jepang menjadikan kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai wilayah kesatuannya pada tahun 1895 setelah Jepang melakukan peninjauan selama 10 tahun dan menemukan bahwa kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak berpenghuni dan tidak bertuan. Namun, Tiongkok menyanggah kedaulatan Jepang atas Senkaku/Diaoyu. Dengan berpegang pada bukti sejarah, Tiongkok menyakini Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok.

Sengketa Senkaku/Diaoyu merupakan isu rumit yang sudah berlangsung sejak lama. Kedua negara saling berseteru dan berselisih pendapat atas kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Terlepas dari kesepakatan bilateral tahun 2008, perselisihan masih sering terjadi antara Tiongkok dan Jepang terkait Kepulauan Senkaku/Diaoyu (*Forbes*, 2016). Perseteruan kedua negara kian memanas pasca insiden tabrakan kapal Tiongkok dengan kapal Jepang di dekat wilayah Senkaku/Diaoyu pada tahun 2010 (*BBC*, 2010). Kapten kapal Tiongkok ditangkap oleh pemerintah Jepang setelah kapal pukat Tiongkok bertabrakan dengan kapal patroli Jepang saat kapal pukat tersebut berlayar mendekati wilayah perairan Senkaku/Diaoyu.

Pada tahun 2012, Jepang melakukan langkah nasionalisasi Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan memperuncing hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Jepang melakukan upaya nasionalisasi dengan membeli tiga pulau di wilayah Senkaku dari pemilik swasta. Hal tersebut menuai reaksi keras Tiongkok yang ditandai dengan aksi protes anti-Jepang, peningkatan pengiriman kapal ke wilayah Senkaku/Diaoyu, dan pemberlakuan kebijakan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) yang mencakup Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada tahun 2013 (*The Japan Times*, 2017). Pemberlakuan kebijakan ADIZ oleh Tiongkok serta kunjungan PM Jepang Abe Shinzo ke Kuil Yasukuni pada tahun 2013 turut memperparah hubungan diplomatik kedua negara yang terlibat dalam Konflik Senkaku (*The Diplomat*, 2013).

Yang (2016) menuliskan bahwa hubungan Jepang-Tiongkok baru mengalami sedikit perbaikan setelah kedua negara setuju mengupayakan kesepakatan damai pada tahun 2014. Dalam salah satu agenda pertemuan APEC di Beijing bulan November 2014, kedua negara bersepakat untuk menggelar rangkaian dialog sebagai upaya mencari solusi damai atas konflik Senkaku dan memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Terlepas dari kesepakatan Jepang-Tiongkok untuk saling berdialog terkait isu sengketa Senkaku/Diaoyu, kedua negara masih menggelar serangkaian aktivitas di dekat Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menunjukkan bahwa kedua negara masih saling mengklaim kedaulatan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Meskipun demikian, Jepang dan Tiongkok kembali bersepakat mengadakan pertemuan pada tahun 2016. Kedua negara mengadakan dialog kemaritiman yang dihadiri oleh pejabat dan diplomat senior selama dua hari di Hiroshima untuk membahas masalah yang terjadi di Laut Tiongkok Timur (*The Japan Times*, 2016).

Motif di balik harmonisasi Tiongkok-Jepang sebagai upaya penyelesaian Konflik Senkaku belum banyak dikaji dalam kajian-kajian terdahulu. Kajian terdahulu tentang Konflik Senkaku secara garis besar membahas tentang (1) kerjasama dan rejim, (2) kebijakan dan strategi, (3) proyeksi kekuatan dan persepsi ancaman serta (4) interaksi kompleksitas hubungan. Kategori pertama kajian terdahulu membahas tentang hubungan kerjasama ekonomi Tiongkok-Jepang yang menimbulkan hubungan interdependensi dan rivalitas (Valencia, 2000; Lee & Kim, 2008; Koo, 2009; Veronica, 2015). Hubungan interdependensi Tiongkok-Jepang dipercaya mampu menekan tingkat perseteruan kedua negara terkait Konflik Senkaku. Di sisi lain, hubungan rivalitas sebagai dampak hubungan kerja sama ekonomi kedua negara menandai persaingan Tiongkok-Jepang di kawasan Asia dan menghambat pembentukan rezim kemaritiman dalam (membantu) menyelesaikan sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Kategori kedua kajian terdahulu membahas tentang kebijakan dan strategi Tiongkok-Jepang terkait Konflik Senkaku (Hook, 2004; Wiegand, 2009; Fravel, 2010; Tamisari & Heryadi, 2017). Kedua negara saling menerapkan kebijakan strategis yang mengeruhkan hubungan diplomatik kedua negara. Namun, perang strategi Tiongkok-Jepang tidak ditujukan untuk menyeret kedua negara ke dalam pertempuran (*major war*) di medan perang. Kategori ketiga kajian terdahulu berfokus pada proyeksi kekuatan Tiongkok-Jepang dan persepsi ancaman oleh kedua negara (Yee, 2011; Rahmanto, 2014; Nakano, 2016). Tiongkok dan Jepang merupakan dua negara besar (*great power*) di kawasan Asia. Kesetaraan kekuatan Tiongkok-Jepang menjadikan kedua negara sebagai lawan tangguh bagi sesama. Namun, persepsi ancaman timbul seiring dengan kebangkitan kekuatan Tiongkok yang menyebabkan eskalasi isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan menyulitkan pencapaian solusi damai antara kedua belah pihak.

Kategori terakhir ialah tentang interaksi kompleksitas hubungan (Downs & Saunders, 1999; Dean, 2000; Su, 2005; Pan, 2007; Liao, 2008; Hafeez, 2015; Jash, 2017). Kategori kajian ini merujuk pada kerumitan penyelesaian sengketa kepulauan yang melibatkan Tiongkok-Jepang. Faktor sejarah, politik, dan kepentingan ekonomi menjadi faktor penghambat penyelesaian Konflik Senkaku. Tiongkok dan Jepang mempunyai sepenggal hubungan sejarah yang kelam. Hal ini menimbulkan sikap antipati Tiongkok terhadap Jepang yang turut mempengaruhi hubungan politik dan diplomasi kedua negara. Hubungan politik dan diplomasi Tiongkok-Jepang yang turut dikendarai dengan

perbedaan kepentingan nasional serta motif keuntungan ekonomi atas penguasaan sumber daya alam di wilayah Senkaku/Diaoyu membuat kedua negara enggan dan sulit menyelesaikan sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Empat kategori kajian terdahulu tentang Konflik Senkaku memperlihatkan bahwa unsur material dan ideasional menjadi faktor penghambat penyelesaian sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu. Hal ini berarti pemaparan kajian terdahulu secara umum bermuara pada dimensi konflik dan latar konflik itu sendiri. Secara khusus, kajian terdahulu belum membahas tentang motif harmonisasi Jepang terhadap Tiongkok sebagai upaya penyelesaian isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat pertanyaan “Mengapa Jepang masih mengusahakan upaya repetitif damai dalam penyelesaian Konflik Senkaku?” Pendekatan manajemen konflik dengan konsep harmoni yang dikembangkan oleh Leung digunakan untuk menganalisa tingkah dan pilihan (rasional) Jepang dalam mengusahakan upaya repetitif damai terkait isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Di bagian berikutnya, tulisan ini secara beruntun menjelaskan tentang pendekatan manajemen konflik dengan konsep harmoni, pembahasan yang berisi analisa motif keputusan Jepang dalam memilih upaya repetitif damai untuk meredam isu sengketa Senkaku/Diaoyu, dan bagian penutup yang berupa simpulan akhir.

### **Konsep Harmoni Dalam Manajemen Konflik**

Kajian ilmu Hubungan Internasional (HI) memiliki tendensi untuk berorientasi ke dunia Barat. Sejarah mencatat bahwa ilmu Hubungan Internasional dipelajari di Britania pada tahun 1900an. Kajian ilmu Hubungan Internasional kemudian menyebar dan berkembang di Amerika sebelum akhirnya diperkenalkan di benua lain. Hal ini membuat kajian teori dalam ilmu Hubungan Internasional sangat didominasi oleh buah pemikiran para ahli HI yang berasal dari Barat. Keadaan ini berarti bahwa teori yang berkembang dalam ilmu Hubungan Internasional didasarkan pada hasil kajian *post factum* ragam konflik yang terjadi di Barat. Hal ini turut mempengaruhi cara pandang dan manajemen konflik sesuai dengan konflik yang terjadi di Barat. Namun, di sisi lain, konflik tidak hanya terjadi di negara dunia Barat. Konflik juga dialami oleh negara di dunia Timur. Interaksi sesama negara di dunia Timur juga turut memunculkan konflik. Permasalahannya ialah negara di dunia Timur mempunyai dimensi yang berbeda dengan

negara di dunia Barat. Negara di dunia Timur mempunyai budaya, sejarah, ideologi, kondisi ekonomi, cara pandang, dan masih banyak hal lain yang belum tentu sama dengan negara di dunia Barat. Alhasil, pendekatan berbeda dibutuhkan untuk menganalisa latar konflik, metode penanganan, dan upaya pencegahannya. Dengan kata lain, manajemen konflik dunia Barat tidak bisa selalu dipakai untuk menganalisa konflik yang terjadi di negara dunia Timur. Konflik di negara dunia Timur membutuhkan alternatif manajemen konflik yang dikembangkan sesuai dengan kondisi dunia Timur.

Manajemen konflik budaya Timur memperlihatkan beberapa perbedaan dengan manajemen konflik yang memiliki tendensi untuk berorientasi ke dunia barat. Manajemen konflik budaya Timur merujuk pada cara penanganan masalah oleh orang Timur (*Easterner*) dan manajemen konflik budaya Barat merujuk pada cara penyelesaian sengketa ala orang Barat (*Westerner*). Orang Timur lebih memilih cara lunak dan damai dalam menyelesaikan sebuah masalah sementara Barat lebih cenderung menyelesaikan konflik secara konfrontatif (Ting-Toomey, 1988). Perbedaan kedua manajemen konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan holisme sebagai latar perbedaan budaya Barat dan budaya Timur (Kim, 2012). Lebih lanjut, manajemen konflik budaya Timur lebih mengedepankan strategi non-konfrontatif dan kooperatif sementara strategi konfrontatif dan kompetitif lebih populer dalam manajemen konflik budaya barat (Wei, 2001). Selain itu, konflik sebagai bagian penting dalam manajemen konflik dipandang dalam budaya Timur sebagai dikotomi harmoni (Feng, 1991) yang merupakan nilai penting dalam keberlanjutan sebuah hubungan (Leung, 2002). Hal ini berarti bahwa manajemen konflik budaya Timur ditujukan untuk menangani permasalahan dengan tidak mengorbankan keharmonisan hubungan sementara manajemen konflik budaya Barat mengedepankan cara asertif untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan kata lain, manajemen konflik budaya Timur bisa dirujuk sebagai manajemen konflik dengan konsep harmoni.

Manajemen konflik dengan konsep harmoni bersifat dikotomi dialektis. Artinya ialah konsep manajemen tersebut ditujukan untuk menyelesaikan konflik dengan tetap menjaga hubungan yang harmonis karena konflik dan keharmonisan hubungan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan walaupun saling bertentangan (Zhang, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa konflik dan harmoni merupakan dua hal berbeda yang saling melengkapi (Cheng, 1997; Huang, 1999). Dalam ungkapan lain, konflik dan harmoni merupakan variabel penting dalam manajemen konflik dengan konsep harmoni.

Terkait dengan perkembangan teori manajemen konflik, ada beberapa model analisa yang dikembangkan dalam teori manajemen konflik dengan konsep harmoni. Pertama, Hwang (1997) mengembangkan model analisa manajemen konflik dengan landasan variabel “mempertahankan” atau “mengabaikan” konflik dan harmoni yang kemudian diikuti dengan lima pilihan strategi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sementara itu, Huang (1999) mengembangkan teorinya dengan membedakan konflik dan harmoni menjadi kategori *genuine* atau *superficial*. Di sisi lain, Chen (2001-2002) mengembangkan teori manajemen konflik dengan penekanan pada kemampuan komunikasi dalam menyelesaikan masalah tanpa merusak hubungan harmonis kedua belah pihak sebagai tolak ukur dasar.

Leung (2002) turut mengembangkan teori manajemen konflik dengan konsep harmoni. Leung membedakan konsep harmoni menjadi variabel *value harmony* dan *instrumental harmony*. Istilah *value harmony* merujuk pada konsep *harmony enhancement*. Dalam aliran konfusius klasik, keharmonisan hubungan merupakan sebuah tujuan penyelesaian sebuah konflik. Upaya penyelesaian konflik ditujukan untuk mengakhiri sebuah konflik dan menjaga hubungan baik antar sesama. Sementara itu, istilah *instrumental harmony* dirujuk sebagai sebuah *disintergration avoidance*. Dalam aliran konfusius sekuler, konflik merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam upaya menjaga keharmonisan hubungan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama agar kepentingan masing-masing pihak bisa tercapai dengan baik pula. Oleh karena itu, *value harmony* ditandai dengan integrasi dan kompromi antara kedua belah pihak yang sedang bertikai sementara *instrumental harmony* ditandai dengan sikap menghindari konflik dan kesediaan saling membantu antara kedua belah pihak (Lim, 2009). Dengan kata lain, variabel *value harmony* mengacu pada falsafah budaya yang menekankan pada upaya pencapaian keharmonisan dalam menyelesaikan konflik oleh aktor negara dan variabel *instrumental hamony* lebih terkait pada motif pencapaian kepentingan nasional seorang aktor negara.

Dalam teori manajemen konflik yang dikembangkan oleh Leung, *value harmony* dan *instrumental harmony* merupakan variabel penentu langkah penyelesaian sebuah konflik. Leung menuliskan bahwa persamaan atau perbedaan tingkat kedua variabel sangat menentukan sikap atau strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan konflik. Leung mengelompokkan hal tersebut ke dalam empat kategori berbeda. Kategori pertama

ditandai dengan ketimpangan variabel *value harmony* dan *instrumental harmony*. Aktor negara berusaha menyelesaikan masalah dengan mengesampingkan pencapaian kepentingan nasional (*low in instrumental harmony*) demi menjaga keharmonisan hubungan seperti yang tercermin dalam falsafah budaya (*high in value harmony*). Pada kondisi ini, aktor negara menunjukkan sikap *aligning* yang ditandai dengan strategi penyelesaian masalah berupa konfrontasi konfrontatif, komunikasi langsung-dan-formal, dan/atau menjalin hubungan akrab. Kategori kedua ditandai dengan rendahnya *value harmony* dan tingginya *instrumental harmony*. Dalam kondisi ini, aktor negara menunjukkan sikap *smoothing* untuk meredam ketegangan agar keharmonisan hubungan bisa tetap terjaga dengan baik seperti yang terkandung dalam falsafah budaya dan memudahkan negara mencapai kepentingan nasionalnya. Pilihan strategi bisa berupa mediasi, bermuka-dua, menghindari konflik, dan/atau mengalah. Kategori ketiga ditandai dengan tingginya kedua variabel. Pada situasi ini, aktor negara melakukan *balancing* terhadap keharmonisan hubungan sebagai sebuah entitas budaya dan demi tujuan pencapaian kepentingan nasional. Strategi penyelesaian masalah dalam kategori ini bisa berupa konfrontasi konstruktif, komunikasi langsung-dan-tidak-langsung, menjalin hubungan akrab, berkompromi, dan/atau mediasi. Kategori terakhir ditandai dengan rendahnya variabel *value harmony* dan *instrumental harmony* serta sikap *disintergrating*. Dalam situasi ini, penyelesaian konflik merupakan tujuan dan fokus utama aktor negara. Aktor negara tidak menghiraukan kepentingan nasional lain apalagi falsafah budaya tentang keharmonisan hubungan. Aktor negara tidak akan segan-segan untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam upaya penyelesaian konflik dengan aktor negara lain.

Dengan demikian, kesimpulannya ialah falsafah budaya dan kepentingan nasional merupakan dua variabel penting dalam teori manajemen konflik dengan konsep harmoni yang dikembangkan oleh Leung (2002). Kedua variabel ini menentukan sikap *aligning*, *smoothing*, *balancing*, atau *disintergrating* aktor negara. Masing-masing sikap merujuk pada pilihan strategi yang berbeda oleh aktor negara dalam menangani konflik. Berdasarkan kerangka teori tersebut, tulisan ini akan menjelaskan motif Jepang dalam upaya repetitif damai terkait isu sengketa Kepulauan Senkaku/Dioayu berdasarkan falsafah budaya dan kepentingan nasional Jepang sebagai variabel utama dalam teori manajemen konflik yang telah diidentifikasi.

Untuk melakukan itu, tulisan ini menggunakan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, berita daring, kutipan wawancara pernyataan kemlu Tiongkok dan Jepang yang dipublikasi dalam portal kementerian masing-masing, serta data daring pendukung lain. Data yang digunakan dalam analisa penelitian merupakan data dengan rentang tahun 1972-2016. Metode triangulasi dipilih untuk menyaring dan menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan.

### **Falsafah Budaya Jepang**

Falsafah budaya Jepang sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusius (551 SM–479 SM). Secara singkat, ajaran Konfusius diperkenalkan ke Jepang pada pertengahan abad ke 6 (Tucker, 2018). Salah satu ajaran Konfusius ialah tentang nilai keharmonisan hubungan antar sesama makhluk (Kilarski, 2008). Oleh karena itu, harmoni menjadi salah satu entitas penting dalam kebudayaan Jepang. Dalam falsafah budaya Jepang, harmoni dikenal dengan konsep *wa* (Spacey, 2015). Secara sederhana, konsep *wa* bisa diartikan sebagai hubungan yang harmonis antar sesama di atas kepentingan pribadi (Genzberger, 1994; Bauman, 1994). Secara eksplisit, konsep *wa* bahkan bisa ditemukan dalam konstitusi nasional Jepang. Dalam salah satu dekrit konstitusi nasional, Pangeran Umayado (574-622) pernah menyebutkan bahwa keharmonisan (*wa*) harus diutamakan dan perkelahian harus dihindari (Aston, 2010). Menurut dekrit tersebut, harmoni merupakan nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam menyelesaikan masalah karena masalah tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan perselesaian. Lebih lanjut, politisi veteran Kamei menyebutkan bahwa harmoni (*wa*) merupakan identitas nasional Jepang dengan semangat jiwa saling membantu satu sama lain sebagai wujud kebahagiaan (Hoffman, 2016). Hal ini memperlihatkan bahwa Jepang mengedepankan keharmonisan hubungan dalam menyelesaikan masalah. Keharmonisan hubungan tetap menjadi jangkar penyelesaian masalah sekalipun masalah tersebut sulit diselesaikan. Jepang menganggap bahwa masalah paling rumit sekalipun bisa diselesaikan dengan sikap toleransi yang tinggi. Penyelesaian masalah dengan cara kekerasan hanya akan mencederai hubungan baik dengan sesama dan hal tersebut bertentangan dengan nilai tradisional budaya Jepang. Dengan kata lain, harmoni mempunyai akar kuat dalam falsafah budaya Jepang.

Nilai harmoni sangat dijunjung tinggi oleh Jepang. Harmoni tidak sebatas dipahami sebagai ajaran filsafat tentang nilai tradisional budaya Jepang. Konsep harmoni juga tercermin jelas dalam langkah diplomasi Jepang. Terkait dengan deretan perselisihan Jepang-Tiongkok, Jepang memilih melakukan diplomasi damai yang ditandai dengan penandatanganan serangkaian kesepakatan seperti Komunike Bersama Jepang-Tiongkok tahun 1972, Traktat Pertemanan dan Perdamaian tahun 1978, dan Kesepakatan Bersama Jepang-Tiongkok tahun 2008. Pada tahun 1972, Jepang bertemu dengan Tiongkok dalam rangka memulihkan hubungan kedua aktor dan menghasilkan Komunike Bersama (JC '72). Dalam isi kesepakatan tersebut, butir 6 dan butir 8 menjabarkan tentang kesepakatan kedua aktor untuk menjalin kembali hubungan pertemanan dengan sikap saling menghormati dan menghargai demi terciptanya hubungan damai di antara kedua belah pihak serta penyelesaian masalah bisa ditempuh dengan cara negosiasi (Kemlu Jepang, 1972). Isi butir dalam kesepakatan JC '72 memperlihatkan upaya dan langkah nyata Jepang untuk memulihkan hubungan dengan Tiongkok melalui cara damai pasca kejadian memilukan di antara kedua belah pihak. Pada tahun 1978, Jepang menandatangani Traktat Pertemanan dan Perdamaian (TPF '78) dengan Tiongkok. Dalam isi kesepakatan TPF '78, pasal 1 ayat 1 menekankan pentingnya hubungan baik di antara kedua aktor dengan prinsip saling menghormati demi keharmonisan hubungan dan pasal 1 ayat 2 menekankan pada penyelesaian masalah secara damai tanpa menggunakan ancaman kekerasan (Kemlu Jepang, 1978). Kedua ayat dalam pasal 1 membutuhkan lebih jauh sikap konsisten Jepang dalam mengedepankan keharmonisan hubungan dengan Tiongkok. Isi kedua ayat tersebut memperlihatkan pilihan Jepang untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan dengan Tiongkok dan pilihan penggunaan kekerasan (militer) hanya akan berakibat pada rusaknya hubungan damai kedua belah pihak serta membawa kehilangan pada upaya penyelesaian masalah.

Jepang kembali menandatangani kesepakatan baru dengan Tiongkok pada tahun 2008. Kesepakatan baru tersebut ialah Kesepakatan Bersama Jepang-Tiongkok Dalam Kerjasama Komprehensif Untuk Mencapai Kepentingan Strategis Umum (JSJC '08). Isi kesepakatan baru tersebut sangat menitikberatkan jalinan hubungan baik dan perdamaian kedua belah pihak. Hal ini terlihat pada dominasi penggunaan kata *peace* dan *peaceful* dari butir awal hingga butir akhir kesepakatan, kecuali butir 2 dan butir 3. Sesuai dengan bunyi butir 1, butir 4(A), butir 6(3D) hingga butir 6(5) dalam kesepakatan JSJC '08,

keharmonisan menjadi sorotan utama sebagai tanggung jawab, peran, tujuan, dan kerjasama kedua negara dalam mengupayakan pengembangan hubungan damai yang berkelanjutan demi menjaga kestabilan kawasan dan menciptakan perdamaian dunia (Kemlu Jepang, 2008). Penandatanganan kesepakatan Jepang-Tiongkok tersebut memperlihatkan keinginan dan komitmen kuat Jepang untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tiongkok. Lebih lanjut, salah satu butir kesepakatan bersama Jepang-Tiongkok menyebutkan tentang kerjasama dan hubungan damai di Laut Tiongkok Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan bersama tersebut salah satunya dilatari oleh penyelesaian Jepang-Tiongkok terkait Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang terletak di wilayah perairan Laut Tiongkok Timur. Penyelesaian Jepang-Tiongkok terkait Kepulauan Senkaku/Diaoyu merujuk pada Insiden Mercusuar '96 (Koo, 2009). Pada tahun 1996, Jepang membangun sebuah mercusuar baru di salah satu pulau Senkaku/Diaoyu dan hal tersebut menuai rangkaian gelombang protes yang menandai perselisihan Jepang-Tiongkok terkait pulau Senkaku (South China Morning Post, 2012). Dalam hal kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu, Jepang mempunyai kedudukan kuat dan sah atas kedaulatan gugusan pulau tersebut (Scoville, 2015; Mrosovsky, 2007). Keadaan ini memperlihatkan bahwa Jepang seharusnya bertindak tegas terkait isu kedaulatan wilayahnya. Namun, Jepang lebih memilih mengupayakan diplomasi damai dengan Tiongkok. Jepang memilih untuk tidak menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi Tiongkok walaupun Jepang merupakan aliansi hegemon Amerika. Jepang tetap ingin dan berusaha memelihara hubungan damai dengan Tiongkok. Dengan kata lain, rangkaian tiga kesepakatan Jepang-Tiongkok menunjukkan bahwa Jepang sangat mengedepankan keharmonisan hubungan terutama terkait dengan perselisihan dengan Tiongkok. Jepang bahkan terlihat enggan menggunakan kekuatan militer untuk melawan Tiongkok yang bisa merusak kestabilan dan hubungan baik diantara kedua belah pihak. Jepang berusaha menjaga keharmonisan hubungan dengan diplomasi damai untuk menghadapi Tiongkok.

Jabaran tentang falsafah budaya memperlihatkan bahwa nilai harmoni merupakan entitas kuat dalam budaya Jepang. Nilai harmoni tidak saja memiliki akar yang kuat sebagai nilai tradisional budaya Jepang tetapi juga tercermin dalam kebijakan luar negeri Jepang. Dalam catatan sejarah konstitusi nasional Jepang, nilai harmoni terlihat dijunjung tinggi sebagai sebuah ajaran filsafat yang baik dan benar. Nilai harmoni tidak lekang seiring dengan perjalanan waktu. Hal ini terlihat dalam diplomasi damai yang dilakukan

oleh Jepang dalam menghadapi Tiongkok. Jepang terlihat selalu berusaha membina dan menjalin hubungan baik dengan Tiongkok terkait perselisihan diantara kedua belah pihak. Isi rangkaian kesepakatan yang ditandatangani oleh Jepang dan Tiongkok memperlihatkan keinginan dan niat Jepang untuk tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan Tiongkok dan berusaha meniadakan bentuk ancaman kekerasan yang bisa merusak hubungan baik kedua belah pihak. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Jepang sangat mementingkan nilai harmoni. Dengan kata lain, falsafah budaya menunjukkan bahwa Jepang memiliki variabel *value harmony* yang tinggi (*high*) dengan tolak ukur intensitas diplomasi damai Jepang kepada Tiongkok.

### **Kepentingan Nasional**

Jepang memiliki ragam kepentingan nasional sama seperti negara lainnya. Kemlu Jepang (2016) menuliskan bahwa salah satu kepentingan nasional Jepang ialah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Jepang menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia (BBC, 2018). Namun, hal tersebut tidak menjamin kemampuan Jepang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jepang tetap membutuhkan negara lain untuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional. Terkait dengan hal tersebut, Tiongkok merupakan mitra penting dalam neraca perdagangan Jepang (Shinohara, 2017). Kemenkeu Jepang (2018) mencatat bahwa perdagangan ekspor-impor barang Jepang didominasi oleh Tiongkok. Pada tahun 2000-2016, jumlah perdagangan ekspor-impor Jepang dengan Tiongkok mencapai JPY 383 triliun sementara jumlah perdagangan ekspor-impor Jepang dengan Amerika hanya mencapai JPY 334 triliun. Dari tahun 2000 hingga 2016, pasar ekspor barang Jepang dikuasi oleh Tiongkok di peringkat kedua setelah Amerika sementara pasar impor barang Jepang mutlak dikuasi oleh Tiongkok di peringkat pertama. Jumlah ekspor barang Jepang ke Tiongkok hingga tahun 2016 tercatat sebanyak JPY 168 triliun dan jumlah ekspor barang Jepang ke Amerika tercatat sebanyak JPY 222 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan neraca perdagangan impor barang Jepang. Jepang melakukan impor barang dari Tiongkok sebanyak JPY 215 triliun dan jumlah impor barang dari Amerika hanya mencapai JPY 112 triliun. Keadaan ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, transaksi perdangan ekspor barang Jepang ke Tiongkok menunjukkan bahwa Tiongkok memegang kontribusi serius dalam sumbangan devisa perdagangan Jepang. Kedua,

tingginya jumlah perdagangan impor Jepang dari Tiongkok menunjukkan bahwa keberadaan Tiongkok berkontribusi besar terhadap Jepang dalam pemenuhan barang-barang kebutuhan domestik. Dengan kata lain, Tiongkok memiliki pengaruh penting dalam perdagangan ekspor-impor sebagai salah satu penggerak roda ekonomi Jepang.

Kepentingan nasional Jepang tidak terbatas pada kebutuhan ekonomi semata. Kemlu Jepang (2016) menambahkan bahwa kepentingan nasional Jepang juga meliputi isu keamanan nasional. Data Bank Dunia (2018) menunjukkan bahwa anggaran belanja pertahanan di kawasan Asia Pasifik cenderung bergerak naik pada abad ke 21. Di kawasan Asia Timur sendiri, Tiongkok dan Jepang tercatat memiliki anggaran belanja pertahanan terbesar dibandingkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Mongolia (SIPRI, 2018). Pada tahun 2000, Jepang tercatat memiliki anggaran belanja pertahanan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan Tiongkok. Jepang memiliki anggaran belanja pertahanan sebanyak US\$ 45 miliar sementara Tiongkok diperkirakan hanya memiliki anggaran belanja pertahanan sebanyak US\$ 41 miliar.

Seiring perjalanan waktu, anggaran belanja pertahanan Jepang tidak mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2008, anggaran belanja pertahanan Jepang tercatat dilampaui oleh anggaran belanja pertahanan Tiongkok. Angka anggaran belanja pertahanan Jepang tidak mencapai setengah jumlah anggaran belanja pertahanan Tiongkok. Angka anggaran belanja pertahanan Jepang hanya sebesar US\$ 44 miliar sementara angka anggaran belanja pertahanan Tiongkok mencapai US\$ 100 miliar. Pada tahun 2016, anggaran belanja pertahanan Jepang tertinggal jauh dari anggaran belanja pertahanan Tiongkok. Jumlah anggaran belanja pertahanan Tiongkok tercatat dengan kisaran US\$ 216 miliar dan jumlah anggaran belanja Jepang hanya berjumlah US\$ 46 miliar. Lebih lanjut, Shinohara (2017) menuliskan bahwa Tiongkok memiliki sekitar 1,7 juta prajurit militer dan 260 hulu ledak nuklir sementara Jepang hanya memiliki 140 ribu prajurit militer dan tidak memiliki senjata nuklir sama sekali. Perbedaan drastis tersebut memperlihatkan ketimpangan kekuatan militer Jepang dengan Tiongkok. Dengan kata lain, peningkatan kekuatan militer Tiongkok merupakan ancaman pertama bagi keamanan nasional Jepang.

Ancaman kekuatan militer Tiongkok turut memunculkan masalah baru bagi Jepang dalam menghadapi ancaman kedaulatan wilayah negara. Jepang harus menghadapi Tiongkok dalam perseteruan kepemilikan Kepulauan Senkaku/Dioayu. Isu

sengketa ini benar-benar membuat Jepang berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Bukti legal yang dimiliki oleh Jepang tidak mencegah Tiongkok bersikap asertif dalam memperebutkan gugusan pulau Senkaku/Diaoyu. Hal ini berarti bahwa keutuhan wilayah sebagai salah satu entitas keamanan nasional merupakan hal yang tidak bisa ditawar sama sekali. Di sisi lain, kekuatan militer Jepang sendiri tidak akan mampu menghadapi kekuatan militer Tiongkok. Kekuatan militer Jepang berada jauh di bawah kekuatan militer Tiongkok yang semakin meningkat pesat. Keadaan ini membuat Jepang menghadapi kekuatan militer yang asimetris. Jepang juga harus menghadapi kenyataan bahwa Amerika tidak mau terlibat konflik dengan Tiongkok terkait isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Amerika mengatakan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu berada di bawah administrasi pemerintah Jepang (Xu, 2014). Hal ini berarti bahwa Amerika menolak terlibat langsung dalam sengketa kepulauan antara Jepang dengan Tiongkok karena Amerika menganggap isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan beban dan tanggung jawab Jepang. Dengan kata lain, Jepang tidak bisa menggunakan kekuatan militer untuk melindungi wilayahnya dari ancaman Tiongkok. Jepang membutuhkan pertimbangan bijak dalam mencari cara jitu menghadapi Tiongkok terkait isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Jabaran kepentingan nasional Jepang memperlihatkan bahwa keberadaan Tiongkok bisa diibaratkan sebagai dua sisi koin. Di satu sisi, Jepang membutuhkan Tiongkok sebagai mitra ekonomi yang penting. Dalam neraca perdagangan Jepang, kontribusi Tiongkok dalam ekspor-impor barang Jepang tercatat mengungguli Amerika sebagai mitra aliansi utama. Kementerian Perdagangan Jepang mencatat bahwa Jepang menerima sumbangan devisa sebanyak JPY 168 triliun dari total perdagangan ekspor barang ke Tiongkok dari tahun 2000 hingga tahun 2016. Dari sisi neraca impor barang, Jepang tercatat melakukan impor barang dari Tiongkok sebanyak JPY 215 triliun dari tahun 2000 hingga tahun 2016. Angka ini menunjukkan bahwa Jepang sangat bergantung kepada Tiongkok dalam menyediakan kebutuhan barang impor. Namun, di sisi lain, keberadaan Tiongkok memberi ancaman terhadap keamanan nasional Jepang. Ancaman Tiongkok terhadap keamanan nasional Jepang ialah ancaman keamanan tradisional yang berasal dari peningkatan kekuatan militer Tiongkok dan sikap asertif Tiongkok dalam isu sengketa kepulauan di wilayah perairan Laut Tiongkok Timur. Hal ini berarti bahwa ada

tiga kepentingan nasional yang harus dicapai oleh Jepang yakni kebutuhan ekonomi, pemenuhan keamanan nasional dari ancaman tradisional kekuatan militer Tiongkok, dan keamanan nasional atas kedaulatan Kepulauan Senkaku/Dioayu. Kebutuhan ekonomi sebagai kepentingan nasional yang pertama dan pemenuhan keamanan nasional dari ancaman peningkatan kekuatan militer Tiongkok sebagai kepentingan nasional yang kedua tidak bisa diabaikan demi kedaulatan Kepulauan Senkaku/Dioayu sebagai kepentingan nasional yang ketiga. Atau, sebaliknya, Jepang tidak bisa mengabaikan kedaulatan Kepulauan Senkaku/Dioayu hanya demi kebutuhan ekonomi dan/atau ketimpangan kekuatan militer Jepang dalam menghadapi kekuatan militer Tiongkok. Keadaan dilematis ini kemudian menjadi pertimbangan penting bagi Jepang untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Tiongkok sebagai mitra perdagangan utama tanpa harus mengorbankan keamanan nasional dengan menghadapi Tiongkok secara militer untuk melindungi keamanan wilayah Kepulauan Senkaku/Dioayu dari ancaman Tiongkok. Dengan kata lain, Jepang harus tetap mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tiongkok agar Jepang bisa mencapai kedua kepentingan nasionalnya tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa Jepang harus menyerahkan kedaulatan wilayah Kepulauan Senkaku/Dioayu kepada Tiongkok. Oleh karena itu, kepentingan nasional membuat Jepang menunjukkan variabel *instrumental harmony* yang tinggi (*high*).

### **Sikap dan Pilihan Strategi Jepang**

Jepang menunjukkan sikap *balancing* dalam isu sengketa Kepulauan Senkaku/Dioayu. Dalam kasus ini, istilah *balancing* tidak merujuk pada konsep harafiah yang dijabarkan oleh kaum realis dalam kajian ilmu Hubungan Internasional. Sikap *balancing* ini bukan merupakan sebuah hasil ataupun strategi yang dilakukan oleh aktor negara dalam upaya mengimbangi kekuatan aktor lawan yang bersifat asimetris. Sikap *balancing* di sini diartikan sebagai sikap perimbangan bobot kebutuhan dan kepentingan aktor negara terkait pilihan cara penanganan konflik. Hal ini tampak pada kuatnya pengaruh budaya tradisional dan pertimbangan kepentingan nasional dalam mempengaruhi Jepang untuk tetap berhubungan harmonis dengan Tiongkok yang bersikap asertif sekalipun. Dalam kajian keamanan tradisional, seorang aktor tentunya akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negaranya terutama

terkait dengan kesatuan wilayahnya dari ancaman negara lain. Namun, bila ditelaah dari dimensi berbeda, pilihan Jepang untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan dengan Tiongkok akan tampak masuk akal karena pengaruh nilai tradisional budaya, kontribusi penting Tiongkok dalam neraca perdagangan Jepang, dan ketimpangan kekuatan militer antara Jepang dengan Tiongkok.

Jepang menunjukkan sikap *balancing* antara variabel *value harmony* dan variabel *instrumental harmony*. Hal ini berarti bahwa pilihan strategi yang digunakan oleh Jepang dalam menangani isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu bisa berupa konfrontasi konstruktif, komunikasi langsung-dan-tidak-langsung, menjalin hubungan akrab, berkompromi, dan/atau mediasi. Dialog Kemaritiman yang diadakan oleh Jepang pada tahun 2016 di Hiroshima menunjukkan bahwa Jepang menggunakan strategi konfrontasi konstruktif. Dalam dialog yang berlangsung selama dua hari tersebut, Jepang terlihat berusaha mencapai kesepakatan baru dengan Tiongkok terkait isu Kepulauan Senkaku (The Japan Times, 2016). Dalam dialog ini, kedua belah pihak saling mengutarakan kepentingannya satu sama lain dan berusaha mencapai titik temu kesepakatan yang memuaskan bagi Tiongkok serta tidak melanggar kedaulatan Jepang. Dialog ini bukan upaya kompromi Jepang dengan Tiongkok dimana Jepang harus mengorbankan kepentingan dirinya demi mencapai kesepakatan dengan Tiongkok. Jepang tetap menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan mempersilahkan Tiongkok mengutarakan kepentingannya atas gugusan pulau tersebut. Hal ini berarti bahwa Jepang menempatkan diri pada posisi yang sejajar dengan aktor lawan dan berdiplomasi dengan Tiongkok agar tidak memiliki kepentingan yang saling bersinggungan atau berseberangan. Sebagai tambahan, Jepang tidak memilih strategi mediasi dalam menangani isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Hal ini dikarenakan isu Senkaku/Diaoyu merupakan isu sengketa wilayah yang tidak membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Hal ini turut dipertegas dalam kutipan pernyataan jubiir Tiongkok yang mengatakan bahwa sengketa wilayah Senkaku/Diaoyu merupakan urusan pribadi Tiongkok dengan Jepang (CNN, 2010). Perihal ini memperlihatkan bahwa mediasi hanya akan menjadi sebuah strategi gagal dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Jepang memilih menjalankan strategi diplomasi konstruktif berupa dialog kemaritiman dengan Tiongkok pada tahun 2016 lalu.

## **Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, tulisan ini memperlihatkan bahwa motif upaya repetitif damai Jepang dapat dianalisis melalui falsafah budaya dan kepentingan nasional Jepang. Pembahasan falsafah budaya menunjukkan bahwa keharmonisan hubungan memang merupakan warisan budaya tradisional. Warisan budaya tradisional ini sangat mengakar pada diri Jepang. Hal ini terbukti pada pilihan Jepang dalam menyelesaikan masalah melalui upaya diplomasi damai. Sementara itu, pembahasan kepentingan nasional memperlihatkan situasi yang sedikit rumit bagi Jepang. Jepang mempunyai tiga kepentingan nasional yakni kebutuhan ekonomi, pengupayaan keamanan nasional dari ancaman kekuatan militer Tiongkok, dan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku/Dioayu. Dari sisi kebutuhan ekonomi, Jepang harus mengakui kontribusi penting Tiongkok dalam neraca ekspor-impor barang. Dari sisi pengupayaan keamanan nasional, Jepang harus menghadapi kekuatan militer yang asimetris dengan Tiongkok. Di sisi lain, Jepang tetap harus menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman Tiongkok yang semakin bersikap asertif. Keadaan ini kemudian memperlihatkan posisi tegas Jepang dalam mempertahankan kedaulatan gugusan pulau Senkaku/Dioayu dengan tetap bersikap arif untuk tidak berseberangan dengan Tiongkok.

Lalu, jabaran situasi demikian memperlihatkan pilihan strategi Jepang dalam menangani isu sengketa Kepulauan Senkaku/Dioayu. Dalam menghadapi perseteruan dengan Tiongkok, Jepang tidak akan gegabah menggunakan cara keras. Jepang tetap menggunakan cara damai karena Jepang masih mengejar kepentingan nasional disamping cara tersebut memang merupakan warisan tradisi budaya. Oleh karena itu, Jepang memilih melakukan konfrontasi konstruktif sebagai pilihan strategi yang paling rasional. Diplomasi melalui dialog kemaritiman dijalankan sebagai cara yang paling memungkinkan dalam menghadapi Tiongkok. Dengan cara tersebut, Jepang berharap bisa mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hal tersebut memberi penjelasan terhadap motif upaya repetitif damai Jepang dalam menghadapi Tiongkok terkait isu sengketa Kepulauan Senkaku/Dioayu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aston, W. G. (2010). *Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697*. Routledge.

- Bauman, S. C. (1994). *In Search of the Japanese Spirit in Talent Education*. Alfred Music
- Berlinger, J. (2017, December 04). North Korea's missile tests: What you need to know. Sumber dari <https://edition.cnn.com/2017/05/29/asia/north-korea-missile-tests/index.html>
- Blanchfield, K. (n.d.). World military spending in 2017 was \$1.74 trillion. Sumber dari <http://visuals.sipri.org/>
- Boat collisions spark Japan-China diplomatic row. (2010, September 08). Sumber dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11225522>
- Boat collisions spark Japan-China diplomatic row. (2010, September 08). Sumber dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11225522>
- Branigan, T. (2012, August 19). China protests over Japanese activists' visit to disputed island. Sumber dari <https://www.theguardian.com/world/2012/aug/19/china-protest-japan-senkaku-diaoyo-island>
- Daiss, T. (2016, June 11). Stop Building In The East China Sea, Japan Tells China. Sumber dari <https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/06/09/stop-building-in-the-east-china-sea-japan-tells-china/#159637023ab0>
- Deans, P. (2000). Contending Nationalisms and the Diaoyutai/Senkaku Dispute, *Security Dialogue*, 31(1), 119-131
- Downs, E. S., & Saunders, P. C. (1999) Legitimacy and the Limits of Nationalism: China and the Diaoyu Islands. *International Security*, 23(3), 114-146
- Five years after nationalization of the Senkaku Islands. (n.d.). Sumber dari <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/09/11/editorials/five-years-nationalization-senkaku-islands/#.WrtImExuLIV>
- Forsberg, T. (1996). Explaining Territorial Disputes: From Power Politics to Normative Reasons. *Journal of Peace Research*, 33(4), 433-449.
- Fravel, M. T. (2010). Explaining Stability in the Senkaku (Diaoyu) Islands Dispute. *Getting the Triangle Straight: Managing China-Japan-US Relations*, Washington, DC: The Brookings Institution, 159
- Genzberger, C. (1994) *Japan Business: The Portable Encyclopedia for Doing Business with Japan*. World Trade Press.

- Hafeez, S. Y. (2015). The Senkaku/Diaoyu Islands Crisis of 2004, 2010, and 2012: A Study of Japanese-Chinese Crisis Management. *Asia-Pacific Review*, 22(1), 73-99
- Hamad, A. A. (2005). The Reconceptualisation of Conflict Management. *Peace, Conflict and Development: An Interdisciplinary Journal*, 7.
- Harmony In Japanese Culture. (n.d.). Sumber dari <https://www.japan-talk.com/jt/new/harmony-in-japanese-culture>
- Hoffman, M. (2016). Western Culture and The End of Japanese “Harmony”. *The Japan Times*. <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/17/national/media-national/western-culture-end-japanese-harmony/#.WwezSUiFPIV>
- Holsti, K. J. (1991). *Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1681-1989*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hook, G. D. (2014). Japan’s Risky Frontiers: Territorial Sovereignty and Governance of the Senkaku Islands. *Japanese Studies*, 34(1), 1-23
- Japan and China hold maritime talks amid Senkaku tensions. (n.d.). Sumber dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/14/national/japan-china-hold-maritime-talks-amid-senkaku-tensions/#.WrvIHohubIU>
- Japan country profile. (2018, February 20). Sumber dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14918801>
- Jash, A. (2017). China, Japan, and the East China Sea Imbroglia. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 13(2), 76-83
- Kemenkeu Jepang (2018) Ministry of Finance: Trade Statistics of Japan. [http://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl\\_e.htm](http://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl_e.htm)
- Kemlu Jepang (1972) Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint72.html>
- Kemlu Jepang (1978) Treaty of Peace and Friendship Between Japan and the People’s Republic of China. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/treaty78.html>
- Kemlu Jepang (2008) Joint Statement between the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China on Comprehensive Promotion of a “Mutually Beneficial Relationship Based on Common Strategic Interests. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint0805.html>

- Kemlu Jepang (2016) Japan's Security Policy.  
[http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we\\_000081.html](http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html)
- Kim, J., & Meyers, R. A. (2012) Cultural Differences in conflict management styles in East and West organizations: Employing holism as a cultural theoretical frame to investigate South Korean and U.S. employee conflict management styles. *Journal of Intercultural Communication*, 29(32), 1.
- Kocs, S. (1995). Territorial Disputes and Interstate War. *Journal of Politics*, 51(1), 159-175
- Koo, M. G. (2009). The Senkaku/Diaoyu dispute and Sino-Japanese political-economic relations: cold politics and hot economics?. *The Pacific Review*, 22(2), 205-232
- Lee, Y., & Kim, S. (2008). Dividing Seabed Hydrocarbon Resources in East Asia: A Comparative Analysis of the East China Sea and the Caspian Sea. *Asian Survey*, 48(5), 794-815
- Liao, J. X. (2008). Sino-Japanese Energy Security and Regional Stability: The Case of the East China Sea Gas Exploration. *East Asia*, 25(1), 57-78
- Lim, L. L. (2009). The influences of harmony motives and implicit beliefs on conflict styles of the collectivist. *International Journal of Psychology*, 44(6), 401-409
- Military expenditure (% of GDP). (n.d.). Sumber dari  
<https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS>
- Mitchell, S. (2016). Territorial Disputes. *Oxford Bibliographies Online Datasets*.  
doi:10.1093/obo/9780199743292-0178
- Mrosovsky, C. R. (2007). International Law's Unhelpful Role in the Senkaku Islands. *U. Pa. J. Int'l L.*, 29, 903.  
[https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume29/issue4/RamosMrosovsky29U.Pa.J.Int'lL.903\(2008\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume29/issue4/RamosMrosovsky29U.Pa.J.Int'lL.903(2008).pdf)
- Nakano, R. (2016). The Sino-Japanese territorial dispute and threat perception in power transition. *The Pacific Review*, 29(2), 165-186
- Pan, Z. (2007). Sino-Japanese over the Diaoyu/Senkaku Islands: The Pending Controversy from the Chinese Perspective. *Journal of Chinese Political Science*, 12(1), 71-92
- Rahmanto, A. H. (2014). Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013). *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 3(1), 67-83

- Scoville, R. (2015, January 12). Sorry, China: Japan Has the Better Claim over the Senkakus. Sumber dari <http://nationalinterest.org/feature/sorry-china-japan-has-the-better-claim-over-the-senkakus-12007>
- Su, S. W. (2005). The Territorial Dispute over the Tiaoyu/Senkaku Islands: An Update. *Ocean Development & International Law*, 36(1), 45-61
- Tamisari, F., & Heryadi, D. (2017). Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina. *Journal of International Studies*, 2(1), 36-52
- Tiezzi, S. (2014, January 07). Shinzo Abe Is Not Welcome In China, And Never Will Be. Sumber dari <https://thediplomat.com/2014/01/shinzo-abe-is-not-welcome-in-china-and-never-will-be/>
- Valencia, H. J. (2000). Regional Maritime Regime Building: Prospects in Northeast and Southeast Asia. *Ocean Development & International Law*, 31(3), 223-247
- Veronica, N. W. (2015). Rivalitas Cina dan Jepang dalam Institusi Regional Asia Timur, *Global: Jurnal Politik Internasional*, 16(1), 19-33
- Wei, W. U., Yuen, E., & Zhu, J. M. (2001). Individualism – Collectivism and Conflict Resolution Styles: A Cross Cultural Study of Managers in Singapore.
- Wiegand, K. E. (2009). China's Strategy in the Senkaku/Diayu Islands Dispute: Issue Linkage and Coercive Diplomacy. *Asian Security*, 5(2), 170-193
- Xu, B. (2014). The U.S.-Japan Security Alliance. *Council on Foreign Relations*, 1. <https://www.cfr.org/backgrounder/us-japan-security-alliance>
- Yee, A. (2011). Maritime Territorial Disputes in East Asia: A Comparative Analysis of the South China Sea and the East China Sea. *Journal of Current Chinese Affairs*, 40(2), 165-193
- Zhao, S. (2016). China's Difficult Relations with Japan: Pragmatism, Superficial Friendship, and Historical Memories. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1(4), 335-353

---

<sup>1</sup> Disampaikan oleh Prof. Dr. Qin Yaqin, President of China Foreign Affairs University and Chancellor of the Diplomatic Academy, dalam konferensi internasional "Mediation, Conflict Prevention, And Resolution In The Emerging Pradigm" yang diselenggarakan oleh Conflux Center, Belgrade, 24-25 Febuari 2018.